



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa maka perlu mengatur penggunaan dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 - b. bahwa guna ketertiban pengalokasian, dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang optimal untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 105
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R, S.H.,M.H.
NIP. 19760417199032007

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Dusun adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi DAK.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD atau atau sumber dana lain selain Dana Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD.
19. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.
20. Status Dusun Memenuhi Syarat selanjutnya disebut Dusun MS adalah Dusun yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RW, setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan setiap RT terdiri paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.

21. Status Dusun Tidak Memenuhi Syarat selanjutnya disebut Dusun TMS adalah Dusun yang tidak memenuhi syarat Dusun MS.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
23. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD Dalam APBD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD setelah kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Alokasi ADD Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi ADD untuk tiap Desa setiap tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD setiap Desa guna memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. kebutuhan Siltap dan Tunjangan kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 - b. kebutuhan Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, serta operasional BPD;
 - c. kebutuhan biaya operasional dan insentif Ketua RT dan RW;
 - d. kebutuhan Siltap dan Tunjangan kinerja Kepala Dusun;
 - e. kebutuhan operasional Pemerintah Desa, dan
 - f. kebutuhan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Penghitungan Siltap Kepala Dusun

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Siltap bagi Kadus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terbagi dalam 3 (tiga) tahapan.
- (2) Pada tahap Kesatu Siltap Kadus diberikan kepada semua Kadus tanpa melihat status Dusun MS atau Dusun TMS di Desa yang memiliki Kadus paling banyak 6 (enam).
- (3) Apabila setelah tahapan kesatu seperti dimaksud pada ayat (2), Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap, maka Kadus yang memperoleh Siltap hanya Kadus Dusun MS.
- (4) Apabila setelah tahapan kesatu dan kedua masih ada Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 1 (satu) – 3 (tiga) maka Desa tidak memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus;

- b. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 4 (empat) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 1 (satu);
 - c. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 5 (lima) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 2 (dua); dan
 - d. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah lebih dari 5 (lima) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 3 (tiga).
- (5) Kepala Dusun yang belum memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dari dana Desa.

Bagian Keempat

Penghitungan Iuran Jaminan Kesehatan Kadus

Pasal 5

- (1) Bagi Kadus yang telah memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD, pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dipotong dari Siltap.
- (2) Bagi Kadus yang tidak memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD mendapatkan alokasi bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari ADD.

Bagian Kelima

Tunjangan Kinerja Kadus

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja Kadus diberikan kepada Kadus dengan status Dusun MS.
- (2) Tunjangan kinerja Kadus dengan status Dusun TMS dapat dialokasikan dari sumber dana selain dari dana transfer.

BAB III
TIM FASILITASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi pengelolaan ADD dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebanyak 12 (dua belas) tahap.
- (2) Pengajuan insentif dan operasional RT/RW dipisahkan dari pengajuan ADD per tahap.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran ADD tahap kesatu

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD tahap kesatu dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 21 Januari tahun berjalan.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan;
 - c. surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa APB Desa;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD sampai bulan Desember tahun sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan Desa;
 - e. rencana penggunaan dana ADD tahap I;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan ADD;
 - g. fotokopi buku rekening kas Desa; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tanggal 25 bulan Januari tahun berjalan, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Desa;
 - b. laporan realisasi ADD bulan sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES); dan
 - c. rencana penggunaan dana ADD bulan berkaitan.
- (4) Berdasarkan permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat pada tanggal 27 Januari tahun berjalan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (5) Penyaluran ADD tahap kesatu dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran ADD tahap kedua dan selanjutnya

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD tahap berikutnya dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD tahap berkaitan.
- (2) Ajuan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Ajuan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi tahap sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan Desa; dan
 - b. rencana penggunaan dana ADD tahap berkaitan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran dan kelengkapan dokumennya.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD per Desa; dan
 - b. lembar verifikasi berkas pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyalurkan ADD ke rekening kas Desa dengan melampirkan rekapitulasi permohonan penyaluran ADD.

- (8) Penyaluran ADD tahap berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 11

Permohonan Penyaluran ADD untuk insentif dan operasional RT/RW dengan melampirkan rencana penggunaan dana.

Pasal 12

- (1) Permohonan ADD perubahan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa perubahan tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan; dan
 - b. rencana penggunaan dana ADD perubahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi, selanjutnya semua berkas dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat.
- (3) Apabila dalam proses verifikasi berkas administrasi penyaluran ADD tidak lengkap, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila terdapat penambahan pagu anggaran ADD setelah Perubahan APBD, maka penyaluran penambahan ADD tersebut dilakukan 1 (satu) kali setelah Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
- (5) Badan Keuangan Daerah melakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Keuangan Daerah melakukan transfer ADD langsung ke rekening kas Desa setelah dikurangi potongan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

Format surat ajuan permohonan pencairan, lembar verifikasi, berita acara verifikasi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai skala prioritas di Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, serta tunjangan pimpinan, anggota dan operasional BPD, serta operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Ketentuan besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dan

- d. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Perangkat Desa di luar susunan organisasi dan tata kerja tidak mendapatkan Tunjangan kinerja.
- (6) Ketentuan tunjangan pimpinan, anggota dan operasional BPD, sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Operasional BPD digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD yang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Insentif RT dan RW, sebagai berikut :
- a. Ketua RT dan Ketua RW diberikan insentif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. Masing-masing RT dan RW diberikan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (8) Penggunaan ADD untuk mendanai kegiatan tersebut di bawah ini, diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa meliputi:
- a. operasional pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. operasional lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. operasional pos pelayanan keluarga berencana - kesehatan terpadu;
 - d. operasional karang taruna;
 - e. operasional satuan perlindungan masyarakat; dan
 - f. kebutuhan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) bagi peserta PBPU yang berasal dari Desa

Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 105
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


METTY FERRISKA R, S.H., M.H.

NIP. 19760417199032007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN PEMBAGIAN PER DESA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA						OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	JUMLAH PEMBIAYAAN	PENCAIRAN			
			KADES	SEKDES	KAUR KASI	KADUS	RT/RW	BPD			RT / RW	TIAP TAHAP		JUMLAH KESELURUHAN
												KE 1 s.d.11	KE 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JATIPURO	NGEPUNGSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	166,106,400	110,000,000	35,600,000	1,562,000	584,828,400	110,000,000	39,589,000	39,569,400	584,828,400
2	JATIPURO	JATIPURWO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	112,500,000	35,600,000	1,716,000	587,216,000	112,500,000	39,559,000	39,567,000	587,216,000
3	JATIPURO	JATIPURO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	120,000,000	35,600,000	1,567,000	594,567,000	120,000,000	39,547,000	39,550,000	594,567,000
4	JATIPURO	JATISOBO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,639,200	102,500,000	35,600,000	1,714,000	575,013,200	102,500,000	39,376,000	39,377,200	575,013,200
5	JATIPURO	JATIWARNO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	107,500,000	35,600,000	3,223,000	578,255,800	107,500,000	39,229,000	39,236,800	578,255,800
6	JATIPURO	JATIMULYO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	100,000,000	28,400,000	1,772,000	561,572,000	100,000,000	38,464,000	38,468,000	561,572,000
7	JATIPURO	JATISUKO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	87,500,000	28,400,000	1,624,000	507,644,000	87,500,000	35,012,000	35,012,000	507,644,000
8	JATIPURO	JATIHARJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	133,200,000	85,000,000	28,400,000	1,618,000	519,778,000	85,000,000	36,231,000	36,237,000	519,778,000
9	JATIPURO	JATIKUWUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	112,500,000	35,600,000	1,679,000	584,179,000	112,500,000	39,306,000	39,313,000	584,179,000
10	JATIPURO	JATIROYO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	112,500,000	35,600,000	1,896,000	581,928,800	112,500,000	39,119,000	39,119,800	581,928,800
11	JATIYOSO	JATISAWIT	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	92,500,000	35,600,000	1,763,000	564,263,000	92,500,000	39,313,000	39,320,000	564,263,000
12	JATIYOSO	PETUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	90,000,000	35,600,000	2,049,000	538,409,000	90,000,000	37,367,000	37,372,000	538,409,000
13	JATIYOSO	WONOKELING	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	87,500,000	35,600,000	2,128,000	557,160,800	87,500,000	39,138,000	39,142,800	557,160,800
14	JATIYOSO	JATIYOSO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	127,500,000	35,600,000	2,050,000	597,082,800	127,500,000	39,131,000	39,141,800	597,082,800
15	JATIYOSO	TLOBO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,106,400	110,000,000	35,600,000	1,809,000	582,075,400	110,000,000	39,339,000	39,346,400	582,075,400
16	JATIYOSO	WONOREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	216,919,200	140,000,000	42,800,000	2,408,000	673,687,200	140,000,000	44,473,000	44,484,200	673,687,200
17	JATIYOSO	BERUK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,372,800	90,000,000	35,600,000	1,913,000	562,445,800	90,000,000	39,370,000	39,375,800	562,445,800
18	JATIYOSO	KARANGSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,639,200	120,000,000	35,600,000	1,964,000	592,763,200	120,000,000	39,396,000	39,407,200	592,763,200
19	JATIYOSO	WUKIRSAWIT	53,400,000	40,320,000	177,840,000	187,279,200	155,000,000	35,600,000	2,739,000	652,178,200	155,000,000	41,431,000	41,437,200	652,178,200
20	JUMAPOLO	PASEBAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	55,000,000	28,400,000	2,326,000	517,126,000	55,000,000	38,510,000	38,516,000	517,126,000
21	JUMAPOLO	LEMAHBANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	70,000,000	35,600,000	1,749,000	538,749,000	70,000,000	39,062,000	39,067,000	538,749,000
22	JUMAPOLO	JATIREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	87,500,000	35,600,000	2,095,000	557,127,800	87,500,000	39,135,000	39,142,800	557,127,800
23	JUMAPOLO	KWANGSAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	187,279,200	92,500,000	35,600,000	1,850,000	588,789,200	92,500,000	41,357,000	41,362,200	588,789,200
24	JUMAPOLO	KARANGBANGUN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	110,000,000	32,000,000	1,579,000	574,979,000	110,000,000	38,748,000	38,751,000	574,979,000
25	JUMAPOLO	PLOSO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	90,000,000	28,400,000	2,255,000	552,587,800	90,000,000	38,548,000	38,559,800	552,587,800
26	JUMAPOLO	GIRIWONDO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	97,500,000	35,600,000	1,715,000	575,215,000	97,500,000	39,809,000	39,816,000	575,215,000
27	JUMAPOLO	KADIPIRO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,639,200	92,500,000	35,600,000	2,332,000	562,631,200	92,500,000	39,177,000	39,184,200	562,631,200
28	JUMAPOLO	JUMANTORO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,639,200	95,000,000	32,000,000	1,897,000	561,096,200	95,000,000	38,841,000	38,845,200	561,096,200
29	JUMAPOLO	KEDAWUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	70,000,000	35,600,000	1,685,000	538,685,000	70,000,000	39,057,000	39,058,000	538,685,000
30	JUMAPOLO	JUMAPOLO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	187,279,200	125,000,000	42,800,000	1,676,000	628,315,200	125,000,000	41,942,000	41,953,200	628,315,200
31	JUMAPOLO	BAKALAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	187,279,200	85,000,000	35,600,000	1,756,000	581,195,200	85,000,000	41,349,000	41,356,200	581,195,200
32	JUMANTONO	SEDAYU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	145,200,000	100,000,000	35,600,000	1,949,000	554,309,000	100,000,000	37,859,000	37,860,000	554,309,000

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA						OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	JUMLAH PEMBIAYAAN	PENCAIRAN			
			KADES	SEKDES	KAUR KASI	KADUS	RT/RW	BPD			RT / RW	TIAP TAHAP		JUMLAH KESELURUHAN
												KE 1 s.d. 11	KE 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	JUMANTONO	KEBAK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	133,200,000	77,500,000	35,600,000	1,962,000	519,822,000	77,500,000	36,860,000	36,862,000	519,822,000
34	JUMANTONO	GEMANTAR	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,372,800	67,500,000	35,600,000	1,866,000	536,898,800	67,500,000	39,116,000	39,122,800	536,898,800
35	JUMANTONO	TUNGGULREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	166,639,200	160,000,000	35,600,000	1,774,000	635,573,200	160,000,000	39,631,000	39,632,200	635,573,200
36	JUMANTONO	GENENGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	107,500,000	35,600,000	1,712,000	585,212,000	107,500,000	39,809,000	39,813,000	585,212,000
37	JUMANTONO	NGUNUT	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	90,000,000	35,600,000	1,613,000	517,333,000	90,000,000	35,611,000	35,612,000	517,333,000
38	JUMANTONO	TUGU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	115,560,000	95,000,000	35,600,000	2,080,000	519,800,000	95,000,000	35,400,000	35,400,000	519,800,000
39	JUMANTONO	SUKOSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	85,920,000	60,000,000	35,600,000	1,682,000	454,762,000	60,000,000	32,896,000	32,906,000	454,762,000
40	JUMANTONO	SAMBIREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	112,560,000	85,000,000	35,600,000	1,764,000	506,484,000	85,000,000	35,123,000	35,131,000	506,484,000
41	JUMANTONO	BLORONG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	95,000,000	35,600,000	1,866,000	522,586,000	95,000,000	35,632,000	35,634,000	522,586,000
42	JUMANTONO	SRINGIN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	130,000,000	35,600,000	1,938,000	607,938,000	130,000,000	39,828,000	39,830,000	607,938,000
43	MATESIH	NGADILUWIH	53,400,000	40,320,000	177,840,000	207,480,000	155,000,000	42,800,000	1,538,000	678,378,000	155,000,000	43,614,000	43,624,000	678,378,000
44	MATESIH	DAWUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,639,200	87,500,000	35,600,000	1,595,000	556,894,200	87,500,000	39,116,000	39,118,200	556,894,200
45	MATESIH	MATESIH	53,400,000	40,320,000	177,840,000	166,639,200	137,500,000	42,800,000	1,569,000	620,068,200	137,500,000	40,214,000	40,214,200	620,068,200
46	MATESIH	KARANGBANGUN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	166,372,800	145,000,000	35,600,000	1,792,000	620,324,800	145,000,000	39,610,000	39,614,800	620,324,800
47	MATESIH	KORIPAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,106,400	112,500,000	35,600,000	2,326,000	585,092,400	112,500,000	39,382,000	39,390,400	585,092,400
48	MATESIH	GIRILAYU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	110,000,000	35,600,000	1,778,000	558,138,000	110,000,000	37,344,000	37,354,000	558,138,000
49	MATESIH	PABLENGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	172,106,400	160,000,000	35,600,000	1,865,000	641,131,400	160,000,000	40,094,000	40,097,400	641,131,400
50	MATESIH	PLOSOREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	166,639,200	147,500,000	35,600,000	1,603,000	622,902,200	147,500,000	39,616,000	39,626,200	622,902,200
51	MATESIH	GANTIWARNO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	72,500,000	35,600,000	1,450,000	540,950,000	72,500,000	39,037,000	39,043,000	540,950,000
52	TAWANGMANGU	GONDOSULI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	88,920,000	90,000,000	35,600,000	2,081,000	488,161,000	90,000,000	33,180,000	33,181,000	488,161,000
53	TAWANGMANGU	SEPANJANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	136,200,000	122,500,000	35,600,000	1,820,000	567,680,000	122,500,000	37,098,000	37,102,000	567,680,000
54	TAWANGMANGU	BANDARAWUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	145,200,000	102,500,000	35,600,000	1,700,000	556,560,000	102,500,000	37,838,000	37,842,000	556,560,000
55	TAWANGMANGU	KARANGLO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	102,500,000	28,400,000	1,542,000	522,562,000	102,500,000	35,005,000	35,007,000	522,562,000
56	TAWANGMANGU	NGLEBAK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	145,200,000	150,000,000	35,600,000	1,593,000	603,953,000	150,000,000	37,829,000	37,834,000	603,953,000
57	TAWANGMANGU	PLUMBON	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	125,000,000	35,600,000	1,742,000	552,462,000	125,000,000	35,621,000	35,631,000	552,462,000
58	TAWANGMANGU	TENGKLIK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	120,000,000	35,600,000	2,146,000	547,866,000	120,000,000	35,655,000	35,661,000	547,866,000
59	NGARGOYOSO	PUNTUKREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	130,000,000	32,000,000	1,717,000	598,117,000	130,000,000	39,009,000	39,018,000	598,117,000
60	NGARGOYOSO	BERJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	162,500,000	35,600,000	1,851,000	649,351,000	162,500,000	40,570,000	40,581,000	649,351,000
61	NGARGOYOSO	GIRIMULYO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	140,000,000	35,600,000	1,747,000	611,747,000	140,000,000	39,312,000	39,315,000	611,747,000
62	NGARGOYOSO	SEGOROGUNUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	60,000,000	28,400,000	1,792,000	468,312,000	60,000,000	34,026,000	34,026,000	468,312,000
63	NGARGOYOSO	KEMUNING	53,400,000	40,320,000	177,840,000	145,200,000	155,000,000	42,800,000	1,967,000	616,527,000	155,000,000	38,460,000	38,467,000	616,527,000
64	NGARGOYOSO	NGLEGOK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	169,106,400	125,000,000	35,600,000	1,892,000	603,158,400	125,000,000	39,846,000	39,852,400	603,158,400
65	NGARGOYOSO	DUKUH	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	65,000,000	28,400,000	1,597,000	473,117,000	65,000,000	34,009,000	34,018,000	473,117,000
66	NGARGOYOSO	JATIREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	62,500,000	28,400,000	1,690,000	470,710,000	62,500,000	34,017,000	34,023,000	470,710,000
67	NGARGOYOSO	NGARGOYOSO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	142,200,000	107,500,000	35,600,000	2,161,000	559,021,000	107,500,000	37,626,000	37,635,000	559,021,000
68	KARANGPANDAN	BANGSRI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	142,200,000	122,500,000	35,600,000	1,670,000	573,530,000	122,500,000	37,585,000	37,595,000	573,530,000
69	KARANGPANDAN	NGEMPLAK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	115,560,000	87,500,000	35,600,000	1,948,000	512,168,000	87,500,000	35,389,000	35,389,000	512,168,000
70	KARANGPANDAN	DOPLANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	95,000,000	35,600,000	1,489,000	542,849,000	95,000,000	37,320,000	37,329,000	542,849,000
71	KARANGPANDAN	GERDU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	109,560,000	77,500,000	35,600,000	1,777,000	495,997,000	77,500,000	34,874,000	34,883,000	495,997,000
72	KARANGPANDAN	KARANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	92,500,000	35,600,000	1,692,000	540,552,000	92,500,000	37,337,000	37,345,000	540,552,000
73	KARANGPANDAN	SALAM	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	60,000,000	28,400,000	1,711,000	468,231,000	60,000,000	34,019,000	34,022,000	468,231,000

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA						OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	JUMLAH PEMBIAYAAN	PENCAIRAN			
			KADES	SEKDES	KAUR KASI	KADUS	RT/RW	BPD			RT / RW	TIAP TAHAP		JUMLAH KESELURUHAN
												KE 1 s.d. 11	KE 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,106,400	130,000,000	35,600,000	1,485,000	601,751,400	130,000,000	39,312,000	39,319,400	601,751,400
75	KARANGPANDAN	TOHKUNING	53,400,000	40,320,000	177,840,000	175,106,400	142,500,000	35,600,000	1,846,000	626,612,400	142,500,000	40,342,000	40,350,400	626,612,400
76	KARANGPANDAN	GONDANGMANIS	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	107,500,000	28,400,000	1,858,000	569,158,000	107,500,000	38,471,000	38,477,000	569,158,000
77	KARANGPANDAN	DAYU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	133,200,000	72,500,000	28,400,000	1,562,000	507,222,000	72,500,000	36,226,000	36,236,000	507,222,000
78	KARANGPANDAN	HARJOSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,106,400	67,500,000	35,600,000	2,053,000	536,819,400	67,500,000	39,109,000	39,120,400	536,819,400
79	TASIKMADU	BURAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	145,000,000	35,600,000	1,501,000	619,501,000	145,000,000	39,541,000	39,550,000	619,501,000
80	TASIKMADU	PAPAHAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	174,840,000	195,000,000	42,800,000	1,454,000	685,654,000	195,000,000	40,887,000	40,897,000	685,654,000
81	TASIKMADU	NGJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	136,200,000	150,000,000	42,800,000	2,010,000	602,570,000	150,000,000	37,714,000	37,716,000	602,570,000
82	TASIKMADU	GAUM	53,400,000	40,320,000	177,840,000	145,200,000	175,000,000	42,800,000	1,703,000	636,263,000	175,000,000	38,438,000	38,445,000	636,263,000
83	TASIKMADU	SURUH	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,106,400	115,000,000	42,800,000	1,597,000	591,063,400	115,000,000	39,671,000	39,682,400	591,063,400
84	TASIKMADU	PANDEYAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	127,500,000	35,600,000	1,487,000	601,987,000	127,500,000	39,540,000	39,547,000	601,987,000
85	TASIKMADU	KARANGMOJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	112,500,000	42,800,000	2,088,000	594,788,000	112,500,000	40,190,000	40,198,000	594,788,000
86	TASIKMADU	KALING	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	135,000,000	42,800,000	2,171,000	620,371,000	135,000,000	40,447,000	40,454,000	620,371,000
87	TASIKMADU	WONOLOPO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	87,500,000	35,600,000	1,632,000	556,132,000	87,500,000	39,052,000	39,060,000	556,132,000
88	TASIKMADU	KALIJIRAK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	133,200,000	115,000,000	35,600,000	1,948,000	557,308,000	115,000,000	36,859,000	36,859,000	557,308,000
89	JATEN	SURUHKALANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	75,000,000	35,600,000	1,558,000	543,558,000	75,000,000	39,046,000	39,052,000	543,558,000
90	JATEN	JATI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	115,560,000	130,000,000	42,800,000	1,494,000	561,414,000	130,000,000	35,951,000	35,953,000	561,414,000
91	JATEN	JATEN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	435,000,000	42,800,000	1,563,000	928,763,000	435,000,000	41,146,000	41,157,000	928,763,000
92	JATEN	DAGEN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	130,000,000	35,600,000	1,397,800	586,757,800	130,000,000	38,063,000	38,064,800	586,757,800
93	JATEN	NGRINGO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	237,120,000	517,500,000	42,800,000	1,668,000	1,070,648,000	517,500,000	46,095,000	46,103,000	1,070,648,000
94	JATEN	JETIS	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	127,500,000	35,600,000	2,016,000	584,876,000	127,500,000	38,114,000	38,122,000	584,876,000
95	JATEN	SROYO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	171,840,000	167,500,000	42,800,000	1,503,000	655,203,000	167,500,000	40,641,000	40,652,000	655,203,000
96	JATEN	BRUJUL	53,400,000	40,320,000	177,840,000	174,840,000	167,500,000	42,800,000	1,507,000	658,207,000	167,500,000	40,892,000	40,895,000	658,207,000
97	COLOMADU	NGASEM	53,400,000	40,320,000	177,840,000	142,200,000	112,500,000	35,600,000	1,499,000	563,359,000	112,500,000	37,571,000	37,578,000	563,359,000
98	COLOMADU	BOLON	53,400,000	40,320,000	177,840,000	171,840,000	167,500,000	42,800,000	2,014,000	655,714,000	167,500,000	40,684,000	40,690,000	655,714,000
99	COLOMADU	MALANGJIWAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	174,840,000	267,500,000	42,800,000	1,550,000	758,250,000	267,500,000	40,895,000	40,905,000	758,250,000
100	COLOMADU	PAULAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	115,560,000	112,500,000	35,600,000	1,865,000	537,085,000	112,500,000	35,382,000	35,383,000	537,085,000
101	COLOMADU	GAJAHAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	59,280,000	42,500,000	28,400,000	1,873,000	403,613,000	42,500,000	30,092,000	30,101,000	403,613,000
102	COLOMADU	BLULUKAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	140,000,000	35,600,000	1,918,000	597,278,000	140,000,000	38,106,000	38,112,000	597,278,000
103	COLOMADU	GAWANAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	140,000,000	35,600,000	1,960,000	567,680,000	140,000,000	35,640,000	35,640,000	567,680,000
104	COLOMADU	GEDONGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	135,000,000	42,800,000	1,731,000	599,291,000	135,000,000	38,690,000	38,701,000	599,291,000
105	COLOMADU	TOHUDAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	122,500,000	35,600,000	1,469,000	570,329,000	122,500,000	37,319,000	37,320,000	570,329,000
106	COLOMADU	BATURAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	217,500,000	32,000,000	1,489,000	670,749,000	217,500,000	37,770,000	37,779,000	670,749,000
107	COLOMADU	KLODRAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	88,920,000	135,000,000	35,600,000	1,986,000	533,066,000	135,000,000	33,172,000	33,174,000	533,066,000
108	GONDANGREJO	WONOREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	272,500,000	42,800,000	1,781,000	766,481,000	272,500,000	41,165,000	41,166,000	766,481,000
109	GONDANGREJO	PLESUNGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	197,500,000	42,800,000	1,761,000	691,461,000	197,500,000	41,163,000	41,168,000	691,461,000
110	GONDANGREJO	JATIKUWUNG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	115,000,000	42,800,000	1,649,000	596,849,000	115,000,000	40,154,000	40,155,000	596,849,000
111	GONDANGREJO	SELOKATON	53,400,000	40,320,000	177,840,000	207,480,000	177,500,000	42,800,000	1,670,000	701,010,000	177,500,000	43,625,000	43,635,000	701,010,000
112	GONDANGREJO	BULUREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	112,500,000	42,800,000	1,625,000	567,685,000	112,500,000	37,932,000	37,933,000	567,685,000
113	GONDANGREJO	REJOSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	109,560,000	70,000,000	35,600,000	1,616,000	488,336,000	70,000,000	34,861,000	34,865,000	488,336,000
114	GONDANGREJO	JERUKSAWIT	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	97,500,000	35,600,000	1,855,000	569,355,000	97,500,000	39,321,000	39,324,000	569,355,000

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA						OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	JUMLAH PEMBIAYAAN	PENCAIRAN			
			KADES	SEKDES	KAUR KASI	KADUS	RT/RW	BPD			RT / RW	TIAP TAHAP		JUMLAH KESELURUHAN
												KE 1 s.d. 11	KE 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	GONDANGREJO	KARANGTURI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	72,500,000	35,600,000	1,603,000	541,103,000	72,500,000	39,050,000	39,053,000	541,103,000
116	GONDANGREJO	KRAGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,106,400	87,500,000	35,600,000	1,522,000	556,288,400	87,500,000	39,065,000	39,073,400	556,288,400
117	GONDANGREJO	WONOSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,106,400	100,000,000	35,600,000	1,622,000	568,888,400	100,000,000	39,074,000	39,074,400	568,888,400
118	GONDANGREJO	DAYU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	136,200,000	82,500,000	35,600,000	1,835,000	527,695,000	82,500,000	37,099,000	37,106,000	527,695,000
119	GONDANGREJO	TUBAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	120,000,000	42,800,000	1,513,000	604,713,000	120,000,000	40,392,000	40,401,000	604,713,000
120	GONDANGREJO	KRENDOWAHONO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	133,200,000	70,000,000	35,600,000	1,663,000	512,023,000	70,000,000	36,835,000	36,838,000	512,023,000
121	KEBAKKRAMAT	BANJARHARJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	105,000,000	35,600,000	2,512,000	553,872,000	105,000,000	37,406,000	37,406,000	553,872,000
122	KEBAKKRAMAT	ALASTUWO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	178,106,400	160,000,000	42,800,000	1,801,000	654,267,400	160,000,000	41,188,000	41,199,400	654,267,400
123	KEBAKKRAMAT	MACANAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	120,000,000	35,600,000	1,557,000	576,917,000	120,000,000	38,076,000	38,081,000	576,917,000
124	KEBAKKRAMAT	NAGSRI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	100,000,000	42,800,000	1,584,000	575,784,000	100,000,000	39,648,000	39,656,000	575,784,000
125	KEBAKKRAMAT	KEMIRI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	169,372,800	175,000,000	39,200,000	1,543,000	656,675,800	175,000,000	40,139,000	40,146,800	656,675,800
126	KEBAKKRAMAT	KEBAK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	112,560,000	80,000,000	35,600,000	1,411,000	501,131,000	80,000,000	35,094,000	35,097,000	501,131,000
127	KEBAKKRAMAT	WARU	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	137,500,000	42,800,000	1,693,000	631,393,000	137,500,000	41,157,000	41,166,000	631,393,000
128	KEBAKKRAMAT	PULOSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	139,200,000	92,500,000	35,600,000	1,479,000	540,339,000	92,500,000	37,319,000	37,330,000	540,339,000
129	KEBAKKRAMAT	MALANGGATEN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	117,500,000	35,600,000	1,617,000	574,477,000	117,500,000	38,081,000	38,086,000	574,477,000
130	KEBAKKRAMAT	KALIWULUH	53,400,000	40,320,000	177,840,000	208,012,800	197,500,000	42,800,000	1,759,000	721,631,800	197,500,000	43,677,000	43,684,800	721,631,800
131	MOJOGEDANG	SEWUREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,372,800	107,500,000	42,800,000	2,392,000	587,624,800	107,500,000	40,010,000	40,014,800	587,624,800
132	MOJOGEDANG	NGADIREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	213,919,200	115,000,000	35,600,000	2,348,000	638,427,200	115,000,000	43,618,000	43,629,200	638,427,200
133	MOJOGEDANG	MOJOGEDANG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	105,000,000	35,600,000	1,640,000	582,640,000	105,000,000	39,803,000	39,807,000	582,640,000
134	MOJOGEDANG	POJOK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	132,500,000	42,800,000	2,196,000	617,896,000	132,500,000	40,449,000	40,457,000	617,896,000
135	MOJOGEDANG	MOJOROTO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	82,920,000	47,500,000	28,400,000	1,598,000	431,978,000	47,500,000	32,039,000	32,049,000	431,978,000
136	MOJOGEDANG	KALIBOTO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	169,372,800	142,500,000	42,800,000	2,578,000	628,810,800	142,500,000	40,525,000	40,535,800	628,810,800
137	MOJOGEDANG	BUNTAR	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	90,000,000	35,600,000	1,803,000	517,523,000	90,000,000	35,626,000	35,637,000	517,523,000
138	MOJOGEDANG	GEBYOG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	177,840,000	157,500,000	35,600,000	2,076,000	644,576,000	157,500,000	40,589,000	40,597,000	644,576,000
139	MOJOGEDANG	GENTUNGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	148,200,000	145,000,000	35,600,000	1,976,000	602,336,000	145,000,000	38,111,000	38,115,000	602,336,000
140	MOJOGEDANG	PENDEM	53,400,000	40,320,000	177,840,000	171,840,000	120,000,000	35,600,000	1,899,000	600,899,000	120,000,000	40,074,000	40,085,000	600,899,000
141	MOJOGEDANG	PERENG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	165,840,000	120,000,000	35,600,000	1,682,000	594,682,000	120,000,000	39,556,000	39,566,000	594,682,000
142	MOJOGEDANG	MUNGGUR	53,400,000	40,320,000	177,840,000	118,560,000	117,500,000	42,800,000	1,666,000	552,086,000	117,500,000	36,215,000	36,221,000	552,086,000
143	MOJOGEDANG	KEDUNGJERUK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	168,840,000	165,000,000	42,800,000	1,869,000	650,069,000	165,000,000	40,422,000	40,427,000	650,069,000
144	KERJO	KUTO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	171,840,000	122,500,000	35,600,000	2,213,000	603,713,000	122,500,000	40,101,000	40,102,000	603,713,000
145	KERJO	TAMANSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,106,400	82,500,000	35,600,000	1,734,000	551,500,400	82,500,000	39,083,000	39,087,400	551,500,400
146	KERJO	GANTEN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	87,500,000	28,400,000	1,984,000	549,284,000	87,500,000	38,482,000	38,482,000	549,284,000
147	KERJO	GEMPOLAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	80,000,000	35,600,000	1,811,000	548,811,000	80,000,000	39,067,000	39,074,000	548,811,000
148	KERJO	PLOSOREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	77,500,000	28,400,000	2,382,000	539,682,000	77,500,000	38,515,000	38,517,000	539,682,000
149	KERJO	KARANGREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	160,639,200	95,000,000	42,800,000	1,701,000	571,700,200	95,000,000	39,725,000	39,725,200	571,700,200
150	KERJO	KWADUNGAN	53,400,000	40,320,000	177,840,000	159,840,000	95,000,000	35,600,000	1,474,000	563,474,000	95,000,000	39,039,000	39,045,000	563,474,000
151	KERJO	BOTOK	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	62,500,000	28,400,000	1,992,000	471,012,000	62,500,000	34,042,000	34,050,000	471,012,000
152	KERJO	SUMBEREJO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	162,840,000	115,000,000	35,600,000	1,558,000	586,558,000	115,000,000	39,296,000	39,302,000	586,558,000
153	KERJO	TAWANGSARI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	163,372,800	112,500,000	35,600,000	1,809,000	584,841,800	112,500,000	39,361,000	39,370,800	584,841,800
154	JENAWI	GUMENG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	79,920,000	42,500,000	28,400,000	2,013,000	424,393,000	42,500,000	31,824,000	31,829,000	424,393,000
155	JENAWI	ANGGRASMANIS	53,400,000	40,320,000	177,840,000	88,920,000	65,000,000	35,600,000	3,536,000	464,616,000	65,000,000	33,301,000	33,305,000	464,616,000

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA						OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	JUMLAH PEMBIAYAAN	PENCAIRAN			
			KADES	SEKDES	KAUR KASI	KADUS	RT/RW	BPD			RT / RW	TIAP TAHAP		JUMLAH KESELURUHAN
												KE 1 s.d. 11	KE 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	JENAWI	JENAWI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	106,560,000	50,000,000	28,400,000	1,741,000	458,261,000	50,000,000	34,021,000	34,030,000	458,261,000
157	JENAWI	TRENGGULI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	109,560,000	75,000,000	28,400,000	1,865,000	486,385,000	75,000,000	34,282,000	34,283,000	486,385,000
158	JENAWI	SIDOMUKTI	53,400,000	40,320,000	177,840,000	109,560,000	80,000,000	35,600,000	2,375,000	499,095,000	80,000,000	34,924,000	34,931,000	499,095,000
159	JENAWI	BALONG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	115,560,000	102,500,000	35,600,000	1,593,000	526,813,000	102,500,000	35,359,000	35,364,000	526,813,000
160	JENAWI	SELOROMO	53,400,000	40,320,000	177,840,000	112,560,000	80,000,000	35,600,000	1,628,000	501,348,000	80,000,000	35,112,000	35,116,000	501,348,000
161	JENAWI	MENJING	53,400,000	40,320,000	177,840,000	88,920,000	80,000,000	28,400,000	1,564,000	470,444,000	80,000,000	32,537,000	32,537,000	470,444,000
162	JENAWI	LEMPONG	53,400,000	40,320,000	177,840,000	142,200,000	110,000,000	35,600,000	1,818,000	561,178,000	110,000,000	37,598,000	37,600,000	561,178,000
												Jumlah dikalikan 11		
		JUMLAH	8,650,800,000	6,531,840,000	28,810,080,000	24,335,630,400	18,942,500,000	5,857,200,000	294,796,800	93,422,847,200	18,942,500,000	68,272,787,000	6,207,560,200	93,422,847,200



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DARI KEPALA DESA
KEPADA BUPATI TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor	:		Karanganyar,
Sifat	:	Segera	Kepada,
Lampiran	:		Yth. Bupati Karanganyar
Perihal	:	Permohonan Pencairan ADD bulan kesatu Tahun Desa Kecamatan	Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karanganyar lewat Camat di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kecamatan Tahap I Tahun, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan ADD Tahap I, sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran berjalan;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan;
3. SK Camat tentang Hasil Evaluasi Raperdes APB Desa;
4. Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai bulan Desember tahun sebelumnya;
5. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan ADD;
7. FC. Buku Rekening Kas Desa;
8. FC. NPWP Desa

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DARI KEPALA DESA
KEPADA BUPATI TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :		Karanganyar,
Sifat :	Segera	Yth. Bupati Karanganyar
Lampiran :		melalui Kepala Dinas
Perihal :	Permohonan Pencairan ADD bulan ke-..... Tahun Desa Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar lewat Camat di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kecamatan tahap ke-.... Tahun, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan ADD Tahap II, sebagai berikut :

1. Rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Desa;
2. Laporan realisasi ADD bulan sebelumnya sesuai aplikasi Siskeudes;
3. Rencana Penggunaan Dana ADD bulan berkaitan.

KEPALA DESA,

.....

C. FORMAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD UNTUK INSENTIF DAN OPERASIONAL RT/ RW DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :		Karanganyar,
Sifat :	Segera	Kepada,
Lampiran :		Yth. Bupati Karanganyar
Perihal :	Permohonan Pencairan ADD untuk Insentif dan Operasional Rt/ Rw Tahun Desa Kecamatan	melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar lewat Camat di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk insentif dan operasional RT/ RW Desa Kecamatan Tahun, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk insentif dan operasional RT/ RW.

KEPALA DESA,

.....

D. FORMAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD PERUBAHAN DARI
KEPALA DESA KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :		Karanganyar,
Sifat :	Segera	Kepada,
Lampiran :		Yth. Bupati Karanganyar
Perihal :	Permohonan Pencairan ADD Perubahan Tahun Desa	melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar lewat Camat
	Kecamatan	di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan untuk Desa Kecamatan Tahun, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan ADD Perubahan, sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran berjalan yang telah diundangkan;
2. Rencana Penggunaan Dana ADD Perubahan.

KEPALA DESA,

.....

E. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD PER TAHAP; INSENTIF DAN OPERASIONAL RT/ RW DAN PERUBAHAN DARI CAMAT KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

Nomor :		Karanganyar,
Sifat :	Segera	Kepada,
Lampiran :		Yth. Bupati Karanganyar
Perihal :	Permohonan Pencairan	melalui Kepala Dinas
	ADD tahap ke-..... (.....)	Pemberdayaan Masyarakat
	Tahun Kecamatan	dan Desa Kabupaten
		Karanganyar
		di -
		KARANGANYAR

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ke-.... (...), Tahun dari Desa-Desa di Kecamatan, dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) yang telah kami verifikasi.

Rekapitulasi jumlah permohonan ADD dan lembar verifikasi tiap Desa terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT,

.....

F. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENCAIRAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD BULAN KE SATU.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA

VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP KE SATU
TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ke satu Tahun Desa Kecamatan, sebesar Rp..... (.....), dengan kesimpulan hasil verifikasi untuk persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing, sebagai berikut :

NO.	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan ADD Tahap I Tahun dari Kepala Desa			Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBDesa
2	Peraturan Desa tentang RKP Tahun Anggaran			Nomor diundangkan Tanggal

3	Perdes APBDesa tahun yang telah diundangkan			Nomor diundangkan Tanggal
4	Surat permohonan pencairan ADD Tahap I Tahun dari Kepala Desa			Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBDesa
5	SK Camat tentang Hasil Evaluasi Raperdes APBDesa			
6	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai bulan Desember tahun sebelumnya			
7	Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I			
8	Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermaterai Rp.10.000,00 tentang pengelolaan dan penggunaan ADD			
9	FC. Buku Rekening Kas Desa			
10	FC. NPWP Desa			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara verifikasi Desa....., Kecamatan.....ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd

2. Sekretaris : (Nama) ttd

3. Anggota : (Nama) ttd

G. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENCAIRAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD SETELAH BULAN KESATU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA

VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP KE-.....
TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa
2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa
3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ke-..... Tahun Desa Kecamatan, sebesar Rp..... (.....), dengan kesimpulan hasil verifikasi untuk persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing, sebagai berikut :

NO	BERKAS YANG DITELITI	ADA/ TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan ADD bulan ke-.... Tahun dari Kepala Desa			Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBDesa
2	Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I			Sesuai aplikasi Siskeudes
3	Rencana Penggunaan ADD bulan ke -			

H. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENCAIRAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD UNTUK INSENTIF DAN OPERASIONAL RT/ RW

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara verifikasi Desa....., Kecamatan.....ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

4. Ketua : (Nama) ttd

5. Sekretaris : (Nama) ttd

6. Anggota : (Nama) ttd

I. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENCAIRAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA

VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN
TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepada Desa

telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan, Tahun Desa Kecamatan, sebesar Rp..... (.....), dengan kesimpulan hasil verifikasi untuk persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing, sebagai berikut :

NO	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan ADD Perubahan Tahun dari Kepala Desa			Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBDesa
2	Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran berjalan yang telah diundangkan			Nomor diundangkan Tanggal

3	Rencana Penggunaan ADD Perubahan			
---	-------------------------------------	--	--	--

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara verifikasi Desa....., Kecamatan.....ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

J. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ADD tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kecamatan
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APBDesa Tahun Anggaran
2. Senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan;
3. Bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Alokasi Dana Desa (ADD) dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....,

KEPALA DESA

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara verifikasi Desa....., Kecamatan.....ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara verifikasi Desa....., Kecamatan.....ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

4. Ketua : (Nama) ttd

5. Sekretaris : (Nama) ttd

6. Anggota : (Nama) ttd